

2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN RENJA-PD)
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS**
Jl. Gatot Subroto Kampung Baru
Kecamatan Kotaagung Timur
Telp. Fax 0722. 22330



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS SOSIAL

Jl. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kotaagung Timur
Telp.Fax (0722) 22330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 050/266.a/30/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.306/42/08/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 103);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 95);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 106);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 113);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 230);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 120);

41. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);
42. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Nomor 932);
43. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.306/42/08/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
- c. BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. BAB IV : Penutup.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Agustus 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
TANGGAMUS,



Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan curahan Rahmat dan Ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) disusun dengan mengacu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, yang selanjutnya dilakukan Sinkronisasi dengan Rencana Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025.

Dengan demikian diharapkan bahwa program kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus adalah Program Kegiatan yang memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Selanjutnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 yang kami susun dapat berjalan dan terlaksana dengan baik serta bermanfaat dalam kegiatan Pembangunan yang akan datang.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal, 25 Agustus 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,**



Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001

DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024	12
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2025	21
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	39

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA - PD

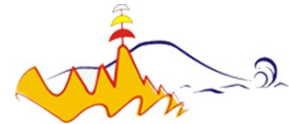
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja-PD	75
3.3. Program dan Kegiatan	77

BAB IV.PENUTUP	91
----------------------	----

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 050/266.a/30/2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS 2025

BAB

I



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Pembangunan nasional dan daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional, juga mengambil peran aktif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Propinsi Lampung khususnya Kabupaten Tanggamus merupakan bagian dari pembangunan ekonomi daerah dan nasional yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan kemajuan pembangunan yang dicapai, disadari pula bahwa keberhasilan pembangunan ternyata masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan, diantaranya masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, banyaknya pengangguran, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan tindak kekerasan yang belum terjangkau oleh proses pembangunan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberikan kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non fisik, dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya.

Meskipun pembangunan secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat di dalam pemeliharaan iklim yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan benegara,serta perubahan-perubahan di tatanan regional dan global, perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan acuan rencana tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya rasa aman yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial saja, melainkan juga pada keberperanan dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Permasalahan pembangunan bidang sosial ke depan masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, banyaknya pengangguran, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku serta akibat bencana.

Diperlukan penyikapan secara terfokus, professional dan proporsional dalam wujud visi, misi, arah kebijakan, strategis, program dan kegiatan pokok indikator kinerja dan dukungan sumber yang lebih jelas, agar hasil nyata pembangunan sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terhitung kontribusinya di dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Tanggamus.

Memperhatikan kondisi dan kecenderungan perkembangan masalah sosial serta tantangan dan kemampuan penanganan yang dimiliki, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus memandang perlu dilakukan perencanaan jauh ke depan sekaligus sebagai bentuk antisipasi menghadapi tantangan, ancaman serta peluang yang mungkin terjadi.

Perencanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan - PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2024. Perubahan Renja PD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus akan dijabarkan ke dalam program-program yang aplikatif sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanggamus selama satu tahun ke depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA Perubahan-PD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus menetapkan Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam bentuk arahan, pedoman, berbagai kegiatan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Misi tersebut selanjutnya disusun Program Prioritas Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perubahan PD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Dinas Sosial

Kabupaten Tanggamus disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tanggamus Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 103);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 95);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 106);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 113);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 230);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 120);
41. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 506);

42. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 Nomor 932);
43. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.306/42/08/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud penyusunan Renja Perubahan PD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 adalah menetapkan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, LSM, dunia usaha dan masyarakat agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergis.

B. TUJUAN

1. Menetapkan Visi dan Misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai oleh pelaksana tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.
2. Menetapkan strategis dan arah kebijakan landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi dan misi.
3. Menetapkan program kegiatan prioritas sebagai rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran tujuan visi dan misi.
4. Mengidentifikasi sumber pembiayaan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.
5. Menetapkan metode pelaksanaan serta sistem pemantauan evaluasi, agar seluruh program dan kegiatan yang

dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja PD Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

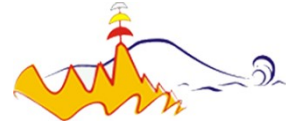
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2025
- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja-PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB

II



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan 7 Program dan 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan dana sebesar Rp. 3.212.626.249, realisasi sebesar Rp. 2.997.541.905,- atau sebesar 93,31%.

Secara terinci Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja 10 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 990.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.430.000,- atau sebesar 40,74%.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 10 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.549.400,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.580.000,- atau sebesar 98,81%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 10 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.520.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.520.000,- atau sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 10 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.361.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.361.000,- atau sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 10 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.040.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.040.000,- atau sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 18 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.124.300,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.124.300,- atau sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 10 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.935.500,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 5.544.300,- atau sebesar 95,30%.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 25 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.076.957.627,- dari dana yang tersedia sebesar Rp 2.131.453.102,- atau sebesar 97,44%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu 25 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 405.630.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 422.130.000,- atau sebesar 96,09%.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 60.840.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 63.240.000,- atau sebesar 96,20%.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 5 Buku dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.410.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 1.410.000,- atau sebesar 100%.

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 1 Unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.502.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 4.132.000,- atau sebesar 84,75%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 550 Kotak dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.514.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 9.600.000,- atau sebesar 88,69%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 450 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.835.300,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 9.723.300,- atau sebesar 90,87 %.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.554.399,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 10.662.247,- atau sebesar 89,61%.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 100 Kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp 40.204.456,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 49.028.000,- atau sebesar 82%.

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 38.734.658,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 54.780.000,- atau sebesar 70,71%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.447.200,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 4.269.200,- atau sebesar 80,75%.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28.015.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 32.906.000,- atau sebesar 85,14%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 6 Unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp 65.784.810,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 86.402.400,- atau sebesar 76,14%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 18 Unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.220.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 6.250.000,- atau sebesar 99,52%.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja yaitu sebesar 1 Unit dengan realisasi anggaran sebesar 5.400.000,- atau sebesar 100%.
- 2) Program Pemberdayaan Sosial dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 30 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.510.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 66.140.500 atau sebesar 89,73%.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu 20 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.010.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 11.700.500,- atau sebesar 94,10%.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu 130 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.850.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 26.365.500,- atau sebesar 56,32%.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu 20 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 3.608.000,- atau sebesar 0%.
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk vdipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 5 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.770.000,- atau sebesar 54,15%.

- 4) Program Program Rehabilitasi Sosial dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu 31 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.010.000- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 25.807.200,- atau sebesar 81,41%.
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan dan Rujukan, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu 8 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 10.967.500,- atau sebesar 0%.
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 1 LS dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 12.500.000,- atau sebesar 0%
 - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 10 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 1.402.000,- atau sebesar 0%.

- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 12 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 38.709.500,- atau sebesar 69,75%.
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.512.550,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 24.852.500,- atau sebesar 82,54%.
- 6) Program Penanganan Bencana dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Penyediaan Makanan, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 200 Paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.791.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 82.791.000,- atau sebesar 83,09%.
 - Sub Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 50 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.750.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. .3750.000,- atau sebesar 100%.

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, pencapaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 55 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.432.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 30.432.000,- atau sebesar 100%.
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kotadengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, pencapaian kinerja Tahun 2024 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.666.105,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 21.322.600,- atau sebesar 64,09%.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan 7 Program dan 14 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan dengan dana sebesar Rp. 4.399.599.435,50,- dan sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 1.581.691.706,- atau sebesar 35,95%.

Secara terinci Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 5 Dokumen dari target kinerja sebesar 10 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.010.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 3.423.500,- atau sebesar 29,50%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 5 Dokumen dari target kinerja sebesar 10 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.010.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 3.575.000,- atau sebesar 26,25 %.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Dokumen dari target kinerja sebesar 10 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.433.000,- atau sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 10 Dokumen dari target kinerja sebesar 10 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.050.500,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.062.500,- atau sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Dokumen dari target kinerja sebesar 10 Dokumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 1.923.000,- atau sebesar 0%.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 6 Eksemplar dari target kinerja sebesar 18 Eksemplar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 298.500,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 1.923.000,- atau sebesar 27,94%.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 8 Laporan dari target kinerja sebesar 10 Laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.414.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.934.500,- atau sebesar 82,26%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 25 Orang dari target kinerja sebesar 25 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.261.261.232,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.373.608.038,50,- atau sebesar 53,14%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 23 Orang dari target kinerja sebesar 23 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 175.612.500,- dari dana yang terdida sebesar Rp. 429.026.250,- atau sebesar 40,93%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 6 Bulan dari target kinerja sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.280.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp.63.240.000,-atau sebesar 32,07%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Laporan dengan dari target kinerja sebesar 5 Laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 1.450.100,- atau sebesar 0%.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Laporan dari target kinerja sebesar 1 Laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 10.316.000,- atau sebesar 0%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 1 Paket dari target kinerja sebesar 1 Paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.542.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 51.088.000,- atau sebesar 4,98%
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 1 Paket dari target kinerja sebesar 1 Paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.128.500,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 11.100.000,- atau sebesar 19,18%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 1 Paket dari target kinerja sebesar 1 Paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.105.900,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 8.348.100,- atau sebesar 37,20%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 1 Paket dari target kinerja sebesar 1 Paket dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.617.223,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 12.881.747,- atau sebesar 43,61%.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 50 Laporan dari target kinerja sebesar 100 Laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.744.931,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 48.074.000,- atau sebesar 26,51%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 1 Laporan dari target kinerja sebesar 1 Laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.355.764,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 49.290.000,- atau 21,01%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 1 Laporan dari target kinerja sebesar 1 Laporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.840.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 31.408.000,- atau sebesar 37,70%.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 1 Unit dari target kinerja sebesar 1 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.264.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 44.170.000,- atau 25,50%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 6 Unit dari target kinerja sebesar 6 Unit, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.152.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp 127.541.600,- atau sebesar 24,42%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 10 Unit dari target kinerja sebesar 18 Unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.030.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp 5.520.000,- atau sebesar 36,78%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 1 Unit dari target kinerja sebesar 1 Unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 11.135.000,- atau sebesar 0%.

2) Program Pemberdayaan Sosial dengan 5 Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 30 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 9.929.800,- atau sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 20 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 9.495.500,- atau sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 130 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.306.600,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 21.273.500,- atau sebesar 24,94%.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 20 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersaedia sebesar Rp. 7.123.000,- atau sebesar 0%.
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 10 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 2.770.000,- atau sebesar 0%.
- 4) Program Program Rehabilitasi Sosial dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 470 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 81.155.000,- atau 0%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 528 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 45.445.000,- atau 0%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 72 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 63.157.200,- atau 0%.
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 7 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 12.075.000,- atau 0%.
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target

kinerja sebesar 150 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 44.535.000,- atau 0%.

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 100 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 37.963.400,- atau 0%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 5 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 9.917.500,- atau sebesar 0%.

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Ls dari target kinerja sebesar 1 Ls dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 42.000.000,- atau sebesar 0%.

- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 6 Orang dari target kinerja sebesar 25 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.620.000,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 89.209.500,- atau sebesar 16,39%.
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1` Sub Kegiatan sebagai berikut
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 6 bulan dari target kinerja sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.207.250,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 132.828.000,- atau sebesar 1,66%.
- 6) Program Penanganan Bencana dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Penyediaan Makanan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus , pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 250 Orang dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 157.675.800,- atau sebesar 0%.

- Sub Penyediaan Sandang, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus , pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 150 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 127.465.000,- atau sebesar 0%.
- Sub Penyediaan Tempat Pengungsi, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus , pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Unit dari target kinerja sebesar 1 Unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 38.520.000,- atau sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 100 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 100.000.000,- atau sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 30 Orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 25.690.000,- atau sebesar 0%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 0 Orang dari target kinerja sebesar 55 Orang dengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 30.432.000,- atau sebesar 0%.

7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, pelaksanaan sub kegiatan ini berlokasi di Kotaagung Timur, pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yaitu 6 Bulan dari target kinerja sebesar 12 Bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.840.806,- dari dana yang tersedia sebesar Rp. 15.322.600,- atau sebesar 18,54%.

Secara terperinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1.				EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS												
				Nama PD : DINAS SOSIAL												
				Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja Renja PD Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra PD s.d Triwulan II Tahun 2025		
												Realisasi Kinerja Renja PD Tahun 2025	Realisasi Tingkat Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
	(1)				(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9) = (5+7)	(10) = (9 / 4)
	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan								
	1	06	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu								
	1	06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	50%		15 Dokumen	50%
	1	06	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	50%		5 Dokumen	50%
	1	06	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	0%		10 Dokumen	33%
	1	06	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%		20 Dokumen	67%
	1	06	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	0%		10 Dokumen	33%
	1	06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	6 Dokumen	33%		24 Dokumen	44%
	1	06	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	10 Laporan	50%		30 Laporan	50%
	1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu								
	1	06	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	75 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%		50 Orang	67%
	1	06	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%		50 Dokumen	67%

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja Renja PD Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra PD s.d Triwulan II Tahun 2025	
											Realisasi Kinerja Renja PD Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
	(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9) = (5+7)	(10) = (9 / 4)
	1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	18 Dokumen	50%
	1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	0%	5 Laporan	33%
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik							
	1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	67%
	1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	67%
	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	67%
	1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	67%
	1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	50 Laporan	50%	150 Laporan	50%
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	50%
	1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Lapran	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	67%
	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	12 Unit	67%
	1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 unit	18 Unit	18 Unit	9 Unit	50%	27 Unit	50%
	1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	33%

	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja Renja PD Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra PD s.d Triwulan II Tahun 2025	
												Realisasi Kinerja Renja PD Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
	(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9) = (5+7)	(10) = (9 / 4)
	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial							
	1	06	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota							
	1	06	02	2.03	01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	90 Orang	30 Orang	30 Orang	0 Orang	0%	30 Orang	33%
	1	06	02	2.03	02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 Orang	22 Orang	20 Orang	0 Orang	0%	20 Orang	70%
	1	06	02	2.03	03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	390 Keluarga	130 Orang	130 Keluarga	0 Keluarga	0%	130 Keluarga	33%
	1	06	02	2.03	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	0%	1 Lembaga	33%
	1	06	03				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani							
	1	06	03	2.01			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/ Kelurahan asal.							
	1	06	03	2.01	01		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	5 Orang	5 Orang	0 Orang	0%	5 Orang	33%
	1	06	04				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi							
	1	06	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
	1	06	04	2.01	01		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	950 Orang	0 Orang	470 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja Renja PD Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra PD s.d Triwulan II Tahun 2025	
											Realisasi Kinerja Renja PD Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
	(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9) = (5+7)	(10) = (9 / 4)
	1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1100 Orang	0 Orang	528 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	267 Orang	31 Orang	72 Orang	0 Orang	0%	31 Orang	12%
	1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0 Orang	7 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	0 Orang	150 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	0 Orang	100 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan dan Rujukan	30 Orang	8 Orang	5 Orang	0 Orang	0%	8 Orang	27%
	1	####	####	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							
	1	####	####	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	25 Orang	25 Orang	0 Orang	0%	25 Orang	33%
	1	####	####	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	87 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	####	####	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	####	####	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	####	####	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	5 Orang	5 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Kinerja Renja PD Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2025		Capaian Target Renstra PD s.d Triwulan II Tahun 2025	
											Realisasi Kinerja Renja PD Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
	(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9) = (5+7)	(10) = (9 / 4)
	1	####	####	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	53 Orang	5 Orang	5 Orang	25 Orang	0%	5 Orang	9%
	1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial							
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terhadap Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
	1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	350 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	50 Keluarga	50%	150 Keluarga	43%
	1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani							
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							
	1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	750 Orang	200 Orang	250 Orang	0 Orang	0%	200 Orang	27%
	1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	0 Orang	150 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
	1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	50 Orang	100 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0 Orang	30 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota							

[illegible]

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sampai dengan akhir renstra periode sebelumnya cukup maksimal, namun masih banyak permasalahan sosial yang masih belum terselesaikan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Kerentanan kondisi masyarakat, pengangguran yang masih cukup tinggi, rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya, teknologi dan informasi serta sumber pembiayaan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.
2. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti balita/anak terlantar, penyandang cacat, gelandangan , masyarakat daerah rawan bencana dan lansia terlantar sehingga perlu pembinaan dan bantuan / stimulan yang berkesinambungan.

Dari beberapa permasalahan di atas oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus pada kurun waktu 2024-2026, akan terus berusaha dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan masyarakat sejahtera, dimasa mendatang Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagai fasilitator dan motivator dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang serta aktif dalam pembangunan.

2. Pendekatan model sosial, dimasa mendatang pelayanan sosial akan berupaya menggali modal sosial yang ada dalam masyarakat. Banyak permasalahan-permasalahan sosial yang belum terjangkau pelayanan karena kemampuan modal ekonomi pemerintah yang sangat terbatas. Disisi lain permasalahan sosial cenderung semakin bertambah serta semakin kompleks, untuk itu pengembangan pelayanan sosial melalui kemampuan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan permasalahan sosial tersebut.
3. Pendekatan sentralistik, untuk masa yang akan datang pemerintah harus menerapkan pendekatan yang bertumpu pada kebutuhn-kebutuhan, aspirasi-aspirasi, potensi dan kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
4. Profesi Pekerja Sosial, di masa mendatang profesi pekerja sosial harus lebih proaktif untuk terlibat dalam merumuskan dan mengembangkan berbagai konsepsi, model dan pendekatan-pendekatan pennanganan permasalahan sosial demi terwujudnya pelayanan sosial yang proofesional.
5. Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial, sebaiknya pengembangan kualitas SDM kesejahteraan sosial yang professional perlu semakin ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal. Pengembangan SDM ini perlu dirumuskan secara konseptual sehingga terlihat sinkronisasi antara kebutuhan real dengan konsep penyediaan SDM.

6. Dalam rangka mengurangi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akan datang sebaiknya pemerintah lebih banyak melakukan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan seluruh jajaran yang berkepentingan (stake holder) yang terkait.

Berikut tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS SOSIAL KABUPATEN TANGGAMUS

Nama PD : DINAS SOSIAL

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(16)
	SPM									
A	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			12,70	12,65	12,60	12,70	0	0	
B	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			87	88	89	87	0	0	

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dibidang Sosial selalu berkoordinasi dengan tingkat Provinsi dan Pusat, serta telah memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat bagaimana Perangkat Daerah dapat memenuhi keinginan pencari kerja, serta masyarakat yang memerlukan bantuan sosial.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dibidang Sosial antara lain SDM belum melaksanakan program kerja dengan sungguh-sungguh, sarana prasarana kurang mendukung, serta minimnya anggaran untuk biaya kegiatan sehingga kurangnya pemerataan dalam pelaksanaan dilapangan sehingga program tidak dapat berjalan secara optimal.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) adalah kurang lancarnya informasi sehingga masih banyak program kegiatan belum tercapai sesuai dengan sasaran yang diharapkan oleh Perangkat Daerah, serta pencapaian Visi dan Misi akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan atau hambatan.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, dibidang Sosial adalah :

Tantangan :

- SDM belum melaksanakan program dengan sungguh-sungguh.
- Anggaran kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan.

Peluang yang ada adalah :

- Meningkatkan SDM dengan mengikuti diklat-diklat
- Penambahan insentif
- Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- Penambahan anggaran.

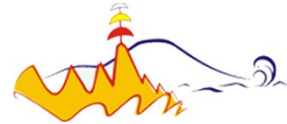
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:
- Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik
 - Meningkatkan sarana dan prasarana
 - Penambahan anggaran/dana.

BAB

III



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA-PD



3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

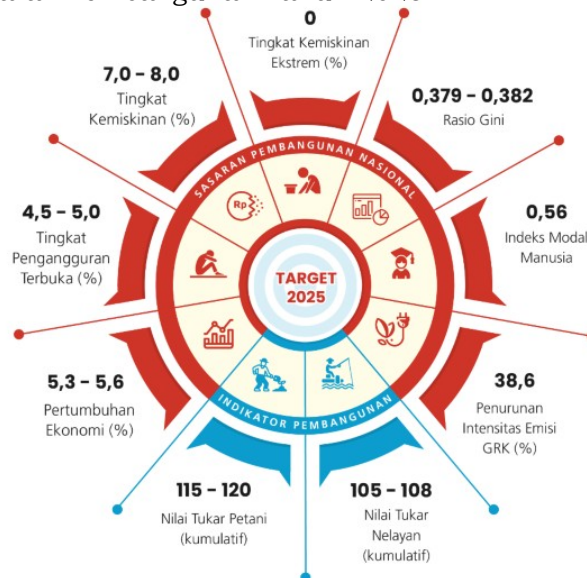
Gambar III.1. Tema Pembangunan Tahun 2025



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

Gambar III.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2025



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maret 2024

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar III.3. Prioritas Nasional 2025



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel III.4 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>, yoy</i>): Akhir Periode	2,5±1,0 ^{a)}
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300–15.900 ^{a)}
3	Cadangan Devisa (miliar USD)	143,3–147,2
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	5,8–5,9
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,6)–(0,6) ^{b) c)}
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	20,8
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60
8	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,30–12,36
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,1–10,3 ^{d)}
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,14)–0,61 ^{a) c)}
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,29)–(2,82) ^{a) c)}
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	37,82–38,71 ^{a)}
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,8
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,23–1.905,60
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5–842,2

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Keterangan: a) Hasil Kesepakatan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025; b) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; c) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif; d) Koordinasi dengan Kementerian Keuangan setelah Kesepakatan Panitia Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang $2,5 \pm 1,0$ persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.300–Rp15.900 per USD.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh didorong oleh peningkatan ekspor utamanya pada produk industri. Sementara impor akan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi *supply* termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional

termasuk penyediaan *database* informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real-time*; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; (6) intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi *marketintelligence*, dan pengamanan pasar ekspor; (7) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (8) penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (9) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi *free trade agreement/comprehensive economic partnership agreement*.

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel III.1 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia				
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 (2023)	81,69–85,23	83,42–86,96
2	Indeks Hak Asasi Manusia	2,70 (2023)	2,75	2,85

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Isu	
• Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang masif; • Memudarnya etika sosial, moral, dan budaya; • Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme; • Keragaman budaya, suku, agama, dan etnis; • Penerapan Pancasila di kalangan pejabat masih kurang (sebanyak 45,8%); • Penerapan Pancasila di masyarakat masih kurang (sebanyak 30,3%); • Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri bangsa; • Media massa hanya mendapatkan 20% dari total anggaran belanja iklan; • Penetrasi media konvensional di masyarakat jauh berkurang. Tingkat penetrasi televisi selalu di atas 90%, kini tinggal 86%, radio 13%, koran dan majalah hanya 8%. Berbanding terbalik dengan media <i>online</i> yang sudah mencapai 70-an%, serta media sosial 62%; • Disrupsi media mengubah pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi (sebanyak 89% masyarakat lebih percaya informasi dari televisi); • Catatan KPK sejak tahun 2002 hingga Januari 2022 menunjukkan terdapat 22 gubernur dan 148 bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi;	• Pada rentang 2021–2023, ICW mencatat terdapat 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi; • Terdapat 125 permohonan <i>judicial review</i> terhadap UU yang disahkan DPR selama periode 2019–2024; • Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, berdasarkan Laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (terdapat 118 putusan selama 2023); • 72% LSM terkena dampak negatif pada sektor keuangan (tahun 2020) akibat COVID-19; • Masih ditemukan kebijakan yang dinilai diskriminatif berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, baik di level pusat maupun daerah (305 peraturan diskriminatif per 2021); • Sejak 2020–2023, Komnas HAM telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM (11.722 pengaduan); • Minimnya Pendidikan HAM secara berkelanjutan bagi penyelenggara negara dan non-penyelenggara negara; • Indonesia belum meratifikasi beberapa perjanjian utama internasional tentang hak asasi manusia; • Pada umumnya, pendekatan pemajuan dan penegakan HAM adalah secara nasional dan belum dilaksanakan berdasarkan kekhususan geografis dan demografis setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Peluang dan Faktor Pendorong	
• Pancasila merupakan ideologi yang dapat menjadi sumber spiritualitas, pemersatu bangsa, dan keadilan sosial; • Pancasila dan wawasan kebangsaan memuat gagasan, nilai-nilai, dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam mengatur tingkah laku seluruh masyarakat Indonesia; • Adanya keragaman budaya, suku, agama, dan etnis;	• Organisasi kemasyarakatan menjadi saluran aspirasi alternatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan; • Semakin kuatnya hubungan anggota legislatif dan konstituen yang didukung platform artikulasi dan partisipasi digital; • Masyarakat sipil menjadi <i>counterbalance</i> dari institusi demokrasi yang menjaga keseimbangan
Arah Kebijakan	
• Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional • Penguatan Komunikasi Publik dan Media • Penguatan Lembaga Demokrasi • Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil • Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain.

Dalam kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan.

Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini diimplementasikan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi peningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita.

Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap seldor tersebut secara berkesinambungan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat. Atas dasar hal tersebut, pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 merumuskan pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Dalam mendukung proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan 6 (enam) sasaran pembangunan jangka menengah untuk membantu mengawal keberhasilan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel III.2 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan				
1	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	15,7	16	20
2	Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	65,6	65,7	66,1
No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	67,5	68,5
4	<i>Global Cybersecurity Index</i>	100	100	98
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60	64
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
6	Indeks Ketahanan Pangan	71,2 ^{a)}	73,2	82,0
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	1,30 (2023)	2,2	3,46
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				
8	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,95
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) ^{b)}	13,2 (2023)	20	23
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)				

10	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50	3,75
11	Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita) ^{b)}	59,59	59,31	63,54
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) ^{b)}	24 (2020)	39,20	51,36
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) ^{b)}	10,21 (2023)	12,5	30
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan				
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3 (2023)	3	1
15	Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI)	34,25 (2023)	38,76	50,73
16	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45 (2023)	43	40
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau				
17	Indeks Ekonomi Hijau	60,08 (2023)	68,34	77,20
18	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) ^{b)}	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)
19	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%) ^{b)}	17,02 (2023)	18,37	21,12
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%) ^{b)}	23,48 (2023)	26,67	30,11
21	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44	0,55
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54 (2023) ^{c)}	76,49	77,20
23	Indeks Kualitas Udara ^{b)}	88,67 (2023) ^{c)}	78,53	79,49
24	Indeks Kualitas Air ^{b)}	54,59 (2023)	72,02	72,77
25	Indeks Kualitas Lahan ^{b)}	61,79	77,97	78,19
26	Indeks Kualitas Air Laut ^{b)}	78,84	81,02	81,22

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1 

Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan

Isu

- **Dinamika geopolitik global** dan adanya **potensi eskalasi ketegangan** di Kawasan.
- **Dinamika geoekonomi di tingkat global**, termasuk fenomena *friendshoring* dan *nearshoring*.
- Masih adanya **Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG)** baik dari dalam maupun luar negeri yang berisiko terhadap keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia.
- **Ancaman pada wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)** yang menjadi jalur strategis perairan.
- **Perkembangan teknologi yang meningkat eksponensial** serta **tingginya trafik anomali** yang berpotensi **mengancam aktivitas ruang siber** Indonesia.
- **Keamanan Nasional belum mampu menjadi landasan transformasi** yang dapat diandalkan akibat kompleksitas ancaman dan gangguan keamanan.

Arah Kebijakan

- Pembangunan postur pertahanan
- Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
- Komponen cadangan dan komponen pendukung
- Intelijen dan keamanan dalam negeri
- Keamanan siber, sandi, dan sinyal
- Keamanan laut dan hidro-oseanografi
- Keamanan dan ketertiban masyarakat
- Profesionalisme pelayanan kepolisian
- Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi

Sasaran 2 

Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)

Isu

- **Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan** (baik untuk pangan, pakan, bioenergi, kesehatan, dan lain-lain);
- **Menurunnya Lahan Baku Sawah (LBS)**, dari 7,46 juta ha tahun 2019 menjadi 7,38 juta ha tahun 2024 (Kementerian ATR/BPN);
- Sekitar **89,54% lahan pertanian, berstatus kurang berkelanjutan** (BPS, 2021);
- Terjadinya **stagnasi/penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan**, diantaranya penurunan produksi padi dari 54,60 juta ton GKG tahun 2019 menjadi 53,98 juta ton GKG tahun 2023 (BPS), produktivitas budidaya ikan <0,6 ton/ha/tahun (BPS);
- **Relatif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan**, diantaranya beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi, susu, gula, dan garam (BPS);
- Sekitar **12,1% kabupaten/kota mengalami rentan rawan pangan** (Badan Pangan Nasional); *Aging farmer* (sekitar 70% petani dan nelayan berusia >43 tahun)
- Perlunya **penguatan cadangan pangan nasional** untuk menghadapi berbagai kondisi;
- **Berfluktuasinya harga pangan** antar musim dan antar wilayah (Badan Pangan Nasional);
- **Rendahnya kesejahteraan petani/nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sektor pertanian** (BPS);
- **Menurunnya proporsi petani/nelayan muda dan rendahnya adopsi teknologi pertanian** (BPS)

Arah Kebijakan

Swasembada pangan

Sasaran 3



Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

Isu

- **Reserve to Production Energi Fosil semakin menurun** (minyak bumi 10,92 tahun, gas bumi 14,57 tahun, dan batubara 41,32 tahun).
- **Impor migas semakin meningkat** selama 5 tahun terakhir (8 persen/tahun).
- **Cadangan Penyangga Energi (CPE) belum tersedia** (BBM 9,64 Juta Barrel, LPG 525,78 Ribu MTon, Minyak Bumi 10,17 Juta Barrel (Perpres 96/2024)).
- **Akses Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga masih minim** (<5% dari Total RT).
- **Pemanfaatan energi terbarukan masih sangat rendah** dibandingkan potensi yang ada (12,6 GW dari 3.687 GW).
- **Potensi Bahan Baku Bioethanol yang melimpah** (tebu 75 ton/ha/tahun, singkong 30 ton/ha/tahun, Jagung 8 ton/ha/tahun).
- **Kapasitas Pabrik Bioethanol masih minim** dibandingkan permintaan pasar (63.000 kL/tahun dari 119.748 kL/tahun).
- **Sektor energi masih menjadi penyumbang emisi terbesar** (43%).

Arah Kebijakan

Swasembada energi

Sasaran 4



Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

Isu

- **Kebutuhan Air** tahun 2045 diproyeksikan meningkat **31%** dari kebutuhan air tahun 2020.
- **Kapasitas Tampung per Kapita Indonesia berada di bawah negara-negara dengan variabilitas musim yang serupa.**
- **Kapasitas *idle* SPAM dan NRW masih tinggi.**
- **80% dari air yang digunakan masyarakat akan menjadi air limbah domestik.**
- **Terdapat hutan dan lahan kritis seluas 12,7 juta ha.**
- **Menurunnya kualitas dan kuantitas mata air.**
- **Rendahnya kinerja BUMD air minum** (34,60% BUMD berkinerja tidak sehat).
- **Hanya 25% kabupaten/kota yang memiliki operator layanan air limbah domestik.**
- **Hanya 10,21% (2023) rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi aman.**
- **Masih ada 203 kabupaten/kota yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik (IPLT atau IPAL).**

Arah Kebijakan

Swasembada air

Sasaran 5



Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan

Isu

Ekonomi Syariah

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi pasar ekonomi syariah global yang besar (**Indonesia baru mencapai peringkat ketiga pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2023/2024**)
- **Masih rendahnya nilai ekspor produk halal Indonesia ke negara OKI** (baru mencapai sekitar 3,8% dari total impor produk halal negara-negara OKI)
- **Masih terbatasnya UMKM yang produknya tersertifikasi halal** (baru sekitar 0,2% dari total UMKM pada tahun 2022)
- **Terbatasnya kapasitas keuangan syariah Indonesia** (size aset keuangan syariah Indonesia masih berada di posisi ke-7 global, dan market share terhadap keuangan nasional baru sekitar 12% pada tahun 2023).
- Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah, wakaf) dengan database yang belum terintegrasi.

Ekonomi Digital

- **Tingkat adopsi digital di sektor strategis belum optimal, dan tingkat maturitas digital yang masih terbatas**
- **Masih rendahnya akselerasi inovasi teknologi baru** untuk meningkatkan daya saing nasional
- **Belum terbangunnya ekosistem dan fasilitas bisnis digital**
- **Tingkat literasi digital di Indonesia paling rendah se-ASEAN** (Indonesia 62% di bawah rata-rata ASEAN 70%)
- **Link and match kesenjangan kualitas dan kuantitas SDM lokal belum sesuai** dengan kebutuhan industri

Ekonomi Biru

- **Kontribusi PDB maritim hanya mencapai 7,93% (2022)**
- **Rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sebesar 49,56**
- **Produksi garam masih rendah** dan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dipenuhi melalui impor
- **Belum terintegrasinya riset maritim** dengan kebutuhan dunia industri

Arah Kebijakan

- Ekonomi syariah
- Ekonomi digital
- Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru

Sasaran 6



Terwujudnya transformasi ekonomi hijau

Isu

- Tiga krisis global yang terus meningkat: **Triple Planetary Crisis**, terdiri dari perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
- **Penerapan Ekonomi Konvensional dan Eksploitatif** yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan daya dukung ekosistem.
- **Produksi sampah domestik nasional diproyeksikan akan meningkat** mencapai 67,8 juta ton per tahun di tahun 2029, dan kondisi pengelolaan sampah masih akan mengalami darurat sampai tahun 2029 (skenario BAU).
- **Kemampuan daya tampung dan daya dukung TPA Nasional diproyeksikan akan penuh** pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat.
- Sebanyak 1.074 tumbuhan, 1.274 satwa liar, dan 2 spesies fungi Indonesia tercatat dalam kategori terancam (*threatened species*).
- **Pengelolaan kawasan hutan Indonesia yang mencakup 62% dari total daratan masih belum optimal** meskipun potensi hutan sangat besar untuk mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan di 9.291 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam kategori miskin.
- **Penyiapan sumber daya manusia dalam menyongsong era pekerjaan baru yang ramah lingkungan (green jobs)** sebagai konsekuensi transisi ekonomi hijau dan transisi energi.
- **Penuntasan layanan dasar wajib sampah** mengingat pengumpulan sampah baru menjangkau 35% rumah tangga. Hanya 20% rumah tangga yang sudah mempunyai tempat sampah tertutup serta hanya 6% rumah tangga yang sudah melakukan pemilahan dan mendapatkan layanan persampahan.
- **Transformasi pengelolaan TPA dari open dumping ke sanitary landfill**, di mana saat ini 40% TPA open dumping dan menyebabkan kebocoran sampah ke laut. Kebocoran sampah plastik ke laut diestimasi mencapai 0,5 juta ton per tahun.

Arah Kebijakan

- Ekosistem ekonomi sirkular
- Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
- Pembangunan rendah karbon
- Pekerjaan hijau/green jobs
- Pengelolaan hutan lestari

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk member ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan Peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025-2029) pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, sertamengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kcia yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktifkoperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 dan tahun 2029 sebagai berikut.

Tabel III.3 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan				
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,0 (2019)	46,5	48,5
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB				
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	170,5 (2023)	188,5	213,6
3	Aset Perbankan/PDB (%)	57,2 (2023)	66,9	77,2
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,3 (2023)	8,0	11,2
5	Aset Asuransi/PDB (%) ^(a)	9,0 (2023)	9,1	10,5
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,9 (2023)	57,8	68,0
7	Total Kredit/PDB (%)	33,9 (2023)	37,8	46,8
8	Inklusi Keuangan (%)	88,7 (2023)	91,0	93,0

Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas

9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23,96	35,00	46,00
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,10	1,20
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,10	3,30
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,10	3,60

Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata

13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)	4,50–4,60	4,90–5,00
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	14,0 (2023)	19–22,1	32,0–39,4

Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,3–7,9	8,0–8,4
----	----------------------------------	-------------	---------	---------

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asuransi sudah mencakup asuransi sosial dan asuransi wajib.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan stasaran-sasaran pembangunan Pada Prioritas Nasional 3, disusun arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran 1

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Isu

- Waktu tempuh koridor utama jalan nasional di Indonesia (2,14 Jam/100 Km) relatif lebih tinggi dibandingkan negara Asean lainnya seperti di Malaysia 1,09 Jam/100 km, Thailand 1,30 jam/100 km dan Vietnam 1,96 jam/100 km)
- Rendahnya muatan balik dari Kawasan Timur (30% dari kapasitas) disebabkan terbatasnya kawasan ekonomi dan belum adanya hub domestik di wilayah Timur
- 90% lalu lintas penerbangan masih terpusat di 5 Bandara Primer (Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, Kuala Namu, dan Sultan Hasanuddin)
- Terdapat lebih dari 100 Airstrip di Papua yang kondisi prasarananya belum memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan
- Skema layanan dan keterpaduan perencanaan transportasi darat, kereta api, laut, dan udara bersubsidi belum optimal
- Pangsa angkutan kereta api regional masih rendah, di sisi lain memiliki keunggulan ekonomis pada jarak menengah (750-1.500 km) dengan demand besar dan menerus
- Tingginya kerugian ekonomi karena kemacetan lalu lintas (Rp65 triliun per tahun) yang diakibatkan terbatasnya sistem angkutan massal perkotaan (pangsa angkutan umum kota-kota di Indonesia masih dibawah 20%)

- Coverage and usage gap fixed broadband yang tinggi. Hingga TW IV 2023, 53,01% wilayah Indonesia dan 97,44% permukiman telah terjangkau sinyal 4G, sementara cakupan 5G mencapai 0,15% wilayah dan 3,73% permukiman, serta 68,49% kecamatan telah memiliki Optical Distribution Point (ODP)
- Kecepatan internet di Indonesia masih rendah di angka 24,96 Mbps dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi nomor 9 di Kawasan Asia Tenggara (Speedtest Global Index, 2023)
- Kapasitas pusat data di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 200 MW, masih jauh di bawah kebutuhan ideal untuk melayani populasi sebesar 270 juta jiwa yang diperkirakan memerlukan kapasitas hingga 2.200 MW
- Kerangka regulasi dalam menghadapi risiko global terkait teknologi, termasuk kekurangan kerangka hukum yang memadai untuk mengatur inovasi digital dan dampaknya (Global Risk Report, 2023)
- Tata kelola ruang digital Indonesia belum kondusif dan belum fair playing field bagi industri

- Belum optimalnya tata kelola jalan daerah yang menyebabkan kesenjangan kualitas antara jalan nasional dan daerah, dari 504.672 km jalan (nasional, provinsi, kab/kota) sebesar 29% mengalami kerusakan (77% di antaranya merupakan jalan daerah)
- Terdapat *backlog* antara kebutuhan dan pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM pencarian dan pertolongan (pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan masih sebesar 42%)
- Tingginya pelanggaran kendaraan muatan berlebih akibat kendaraan *Over Dimension & Over Load* (ODOL) menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Sebesar 40%-50% kendaraan di Lintas Utama Pulau Jawa dan 30%-40% kendaraan di Sumatera tergolong ODOL
- Belum terpenuhinya target jumlah lulusan diklat teknis pendidikan dan diklat pemberdayaan masyarakat keselamatan *safety and security* (persentase jumlah lulusan masih di bawah 50% pada tahun 2023)
- Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan masih terbatas sehingga kualitas layanan ketenagalistrikan masih rendah, serta *lock-in* dan ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil masih tinggi (Konsumsi listrik per kapita 1.337 kWh di tahun 2023)
- *Supply-Demand* dan *Spatial Mismatch* terutama sumber daya energi terbarukan dan pusat beban/permintaan energi listrik (Kapasitas pembangkit listrik 91 GW dan Panjang jaringan transmisi sebesar 87.691 kms kumulatif di tahun 2023)
- Kebutuhan investasi yang besar dan ketergantungan terhadap pembiayaan dan teknologi dari luar negeri
- Masih tingginya alokasi subsidi dan kompensasi listrik serta penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran (subsidi listrik tahun 2023 sebesar Rp68,64 triliun)

Arah Kebijakan

- Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda
- Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik

Sasaran 2



Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB

Isu

- Dangkalnya kedalaman sektor keuangan, terutama pada sektor keuangan nonbank (sektor keuangan masih didominasi perbankan)
- Belum efisiennya struktur perbankan yang mendorong tingginya *cost of fund*
- Belum optimalnya fungsi intermediasi (penyaluran kredit masih terpusat di Pulau Jawa dan belum optimal disalurkan kepada sektor prioritas)
- Rendahnya penetrasi dan densitas industri dana pensiun dan asuransi, serta terbatasnya diversifikasi produk
- Rendahnya basis investor dan instrumen investasi pada pasar modal
- Rendahnya literasi dan tingginya *gap* antara inklusi dan literasi keuangan

Arah Kebijakan

- Pendalaman Sektor Keuangan

Sasaran 3



Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas

Isu

- Sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro sehingga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang baik
- Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian
- Kurangnya penerapan standar, sertifikasi, teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha, dan UMKM
- Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri
- Belum optimalnya ekosistem usaha, termasuk pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM dalam mendukung pengembangan koperasi, wirausaha, dan UMKM

Arah Kebijakan

- Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi

Sasaran 4



Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata

Isu

- Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (*overtourism*) dan akulturasi budaya dari wisatawan
- Terbatasnya amenities, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaldah pariwisata berkelanjutan
- Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
- Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal

Arah Kebijakan

- Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Sasaran 5



Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

Isu

- Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal terutama untuk mendukung komersialisasi kekayaan intelektual
- Ketersediaan data ekonomi kreatif yang terbatas berdampak terhadap minimnya investasi dan kesenjangan kebijakan di daerah
- Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
- Daya saing SDM ekonomi kreatif yang rendah khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual
- Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal mengakibatkan kesenjangan pengembangan ekonomi kreatif di daerah

Arah Kebijakan

- Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel III.4 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata				
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22 ¹⁾	9,33	9,82
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,21 ¹⁾	13,32	13,58
3	Rata-rata nilai PISA			
(a)	Membaca	359 (2022) ³⁾	396	409
(b)	Matematika	366 (2022) ³⁾	404	416
(c)	Sains	383 (2022) ³⁾	416	426
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			
(a)	Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89
(b)	Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) ^{c)}	31,45 (2023) ²⁾	33,94	38,04
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11	12,68
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 (2023) ²⁾	66,78	67,66
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua				
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,13 (2023) ²⁾	74,43	75,4
9	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023) ⁴⁾	2,12	2,10
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) ^{c)}	189 (2020) ²⁾	122	77
11	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) ^{c)}	21,50 (2023) ⁵⁾	18,8	14,2
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) ^{c)}	387 (2023) ⁶⁾	329	190
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) ^{c)}	98,42 (2024) ⁷⁾	98,6	99

Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89 75,55
15	Indeks Perlindungan Anak ^{a)}	68,29 (2023)	70,19 75,29
16	Indeks Pembangunan Pemuda ^{b)}	60,59 (2023)	65,16 73,27
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,447 (2023) ²⁾	0,430 0,394
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85 (2023) ²⁾	92,02–92,11 92,34–92,54
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94 96
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69 71
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja			
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53 49
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50–5,00 4,00–4,71
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) ^{c)}	0,28 (2020)	0,30 0,45
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) ^{c)}	56,42	56,30–58,80 56,70–60,89
Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat			
25	Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Olympic Games</i>	2	4–6 (2028)
26	Jumlah Perolehan Medali Emas pada <i>Paralympic Games</i>	1	4–6 (2028)
27	Peringkat pada <i>Asian Games</i>	13 (2023)	9–11 (2026)
28	Peringkat pada <i>Asian Para Games</i>	6 (2023)	5–7 (2026)
29	Peringkat pada <i>SEA Games</i>	3 (2023)	3 2–4
30	Peringkat pada <i>ASEAN Para Games</i>	1 (2023)	1–2 (2029)
31	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	9,04 ¹⁾	10,36–11,45 ¹⁾ 12,13–13,40 ¹⁾

Keterangan: a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun; b) merupakan indeks dengan pembaruan konsep dan indikator penyusun dan c) merupakan 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN yang bukan di level Prioritas Nasional 1) Susenas, BPS; 2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5) Kemenkes; 6) WHO; 7) DJSN

Arah Kebijakan

Pembangunan dan pembentukan modal manusia bertujuan untuk memastikan setiap individu, terlepas dari karakteristik dan latar belakangnya, dapat tumbuh dan berkembang dalam tingkungan yang sehat, aman, gerta bebas dari kekerasan dan diskriminasi di setiap tahapan siklus kehidupan, dengan dukungan dari keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang kondusif. Tujuan ini dapat terwujud apabila setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menikmati manfaat pembangunan, mengembangkan potensi diri secara optimal, serta berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata

Isu

- Layanan pendidikan belum merata terutama jenjang PAUD (APK: 36,36%) dan SMA/SMK/MA/Sederajat (APK: 86,34%); sementara tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA/Sederajat masih rendah (86,79%)
- Akses terhadap listrik dan internet masih terbatas sebanyak 2.458 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik dan internet
- Masih tingginya jumlah ruang kelas rusak yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi satuan pendidikan dalam menampung peserta didik (23,33% ruang kelas rusak ringan dan 21,84% ruang kelas rusak sedang-berat-total)
- Kualitas pendidikan masih rendah (Rata-rata skor PISA Indonesia tahun 2022 368,99, tertinggal dari rata-rata negara OECD 477,53)
- Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas (<50% guru memiliki sertifikat pendidik; kekurangan 679 ribu guru)
- Pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan belum optimal kasus perundungan sangat tinggi, sebanyak 41,1% siswa mengalami *bullying*
- Partisipasi pendidikan tinggi masih rendah, terutama pada kelompok penduduk 20% termiskin, yaitu 17,51%
- Kualitas lulusan pendidikan tinggi masih rendah sehingga produktivitas & daya saingnya masih rendah
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan PT (Diploma & S1/S2/S3) mencapai 9,39%
 - 2,83% lulusan PT masih ada yang bekerja di bidang keahlian rendah
- Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah (10,15% dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023)
- Daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global masih belum optimal yang tercermin dari peringkat 90 dari 133 negara untuk pilar *human capital and research* pada GII 2024
- Masih rendahnya budaya literasi, kreativitas dan inovasi, yang tercermin dengan nilai budaya literasi 60,49 di 2023

Arah Kebijakan

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
- Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
- Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
- Penguatan sistem tata kelola pendidikan
- Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)*
- Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi

Sasaran 2



Terwujudnya kesehatan untuk semua

Isu

- Angka Kematian Ibu masih tinggi (189/100.000)
- *Stunting* masih tinggi (21,50 persen)
- Prevalensi obesitas terus meningkat (23,4 persen)
- *Wasting* masih tinggi (8,5 persen)
- Kasus baru tuberkulosis peringkat ke-2 dunia (387 per 100.000 penduduk)
- Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)
- Masih terdapat 39,96 persen puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar
- Masih terdapat 27,9 persen Rumah Sakit Umum Daerah kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
- Rumah sakit terakreditasi paripurna masih belum optimal (37,0 persen)
- Puskesmas terakreditasi paripurna masih belum optimal (26,0 persen).

Arah Kebijakan

- Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
- Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
- Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
- Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
- Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola

Sasaran 3



Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

Isu

- Tingginya angka perceraian di Indonesia, mencapai 408.347 kasus (per 6 Februari 2024)
- Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih rendah (63,83)
- 18 dari 100 anak laki-laki/perempuan 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik (SNPHAR, 2024)
- Proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 6,92%
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) cenderung stagnan (91,85)
- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih tinggi (0,447)
- 6,6% perempuan 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan/atau selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (SHPN, 2024)
- 46,3% anak perempuan 15-49 tahun mengalami P2GP (sunat perempuan) (SHPN, 2024)
- Indeks Pembangunan Pemuda belum optimal (60,59; 2023) persentase pemuda NEET masih tinggi (25,80%; Sakernas 2023)

Arah Kebijakan

- Peningkatan ketangguhan keluarga
- Peningkatan kualitas perlindungan anak
- Peningkatan kualitas pemuda
- Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
- Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia

Sasaran 4



Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja

Isu

- Persentase lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) seni budaya yang bekerja di bidang seni budaya masih rendah, ditandai dengan capaian 2023 hanya sebesar 3,57%
- Kontribusi iptek dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah (TFP hanya berkontribusi sebesar 0,3% dari total PDB)
- Kapasitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi masih rendah (peringkat 54 dari 133 negara dalam GII pada tahun 2024 dengan *pillar knowledge and technology outputs* yang masih rendah peringkat 73 dari 133 negara)
- Anggaran riset yang masih rendah serta pemanfaatannya belum dikelola dengan baik ditandai pengeluaran Iptek dan Inovasi Indonesia masih 0,26% dari PDB
- Potensi supply iptek dan inovasi besar (terdiri dari 320 ribu Dosen, 8 ribu peneliti/perkayasa, dan 9 juta mahasiswa yang melakukan penelitian setiap tahun namun belum dioptimalkan secara nasional dan dipertemukan secara optimal)
- Masih tingginya lulusan menengah-tinggi yang bekerja pada bidang keahlian rendah (33,70% penduduk berkualifikasi pendidikan menengah-tinggi yang bekerja di bidang keahlian rendah)
- Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, yaitu 19% dari tingkat produktivitas tenaga kerja Amerika Serikat (APO, 2024). Angka tersebut juga berada di bawah rerata Kawasan ASEAN (20%). Rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya angkatan kerja berpendidikan SMP/MTs ke bawah sebesar 52,32% (BPS, 2024), ketidaksesuaian keahlian (*skill-mismatch*) di pasar kerja, belum terbangunnya sistem informasi pasar kerja yang kredibel, tingginya kasus perselisihan Hubungan Industrial (HI), rendahnya kepatuhan norma ketenagakerjaan, serta terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan vokasi.

Arah Kebijakan

- Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
- Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
- Pengembangan Manajemen Talenta Nasional

Sasaran 5

Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat

Isu

- Capaian prestasi olahraga di tingkat dunia masih minim (2 emas pada Olimpiade dan 1 emas pada Paralimpiade 2024)
- Peringkat prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional saat tidak menjadi tuan rumah menurun signifikan (peringkat ke-13 pada Asian Games 2023 dan peringkat ke-6 pada Asian Para Games 2023)
- Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional belum optimal (73,38%; 2023)

- Keaktifan berolahraga sangat rendah (9,04% penduduk >10 tahun minimal 3 kali atau 150 menit; 2021)
- Budaya berolahraga masih rendah (25,92% penduduk >10 tahun yang berolahraga seminggu terakhir, 8,24% kaum difabel, dan 48,71% usia sekolah; 2021)
- Jumlah tenaga olahraga bersertifikat internasional yang timpang (86 orang cabor olimpiik sementara paralimpiik belum ada; 2023)

Arah Kebijakan

- Peningkatan pembinaan prestasi olahraga
- Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Sebuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat. Melalui hilirisasi dan industriatisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan demikian, tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Prioritas Nasional ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena itu pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumberdaya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan jangka menengah pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel III.5 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan				
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67 (2023)	20,80	21,90
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
2	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52	12,50
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3 (2023)	29,4	29,9
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7 (2023)	21,7	22,6

Arah Kebijakan

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehinggampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Arah Kebijakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan

Isu

- Penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 20,99% (2015) menjadi 18,67% (2023)
- Peringkat *Competitive Industrial Performance Index* Indonesia pada tahun 2021 (ke-39) masih berada di bawah Vietnam (ke-30), Thailand (ke-25), dan Malaysia (ke-20)
- Struktur Industri Pengolahan Indonesia masih didominasi oleh *Resource Based* dan *Low-Technology Industry*
- Peringkat dalam *Economic Complexity Index* Indonesia pada tahun 2021 (ke-64) masih dibawah Vietnam (ke-61), India (ke-42), Malaysia (ke-28), Thailand (ke-23), dan China (ke-18)
- Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam 4 dekade terakhir
- 88,7% Tenaga Kerja Indonesia masih didominasi oleh *unskilled labor* dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi STEAM
- Tuntutan dekarbonisasi serta penggunaan energi bersih dan terbarukan semakin tinggi
- Indonesia hanya mampu menambah (diversifikasi) 11 produk baru dengan tingkat kompleksitas tinggi dalam 15 tahun terakhir (hanya berada di Grade C). Sementara Vietnam mampu melakukan diversifikasi sampai 41 produk baru (Grade A+)
- Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam sebagai modalitas hilirisasi namun belum banyak yang diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri, seperti:
 1. Di tahun 2023 Indonesia berkontribusi terhadap 50% total produksi nikel global, namun produk yang diekspor sebagian besar masih berupa *intermediate product* (seperti feronikel, nikel *matte*) karena investasi di industri hilir nikel (seperti *stainless steel* dan baterai) relatif lebih sedikit.
 2. Pada tahun 2023, *supply* minyak sawit Indonesia mencapai 53,6 juta ton namun 51,6% diantaranya langsung diekspor dalam bentuk CPO dan hanya 24,0% yang diolah lebih lanjut sebagai bahan baku untuk industri dalam negeri.
 3. Pada tahun 2023, produksi rumput Laut mencapai 9,75 juta ton, namun ekspor rumput laut baru mencapai USD 433,71 juta. Saat ini, diversifikasi rumput laut Indonesia masih terbatas pada rumput laut kering (*raw material*), karagenan dan tepung agar-agar. Sementara itu, masih terdapat potensi diversifikasi rumput laut bernilai tinggi yang dapat dikembangkan, seperti biostimulan, *biofuel*, dan bioplastik.

Arah Kebijakan

- Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor
- Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi

Sasaran 2

Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Isu

- Belum optimalnya infrastruktur dan layanan konektivitas, di antaranya simpul utama dan jaringan transportasi multimoda yang belum terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan
- Daya saing SDM dan pelaku usaha dalam negeri di bidang logistik masih perlu ditingkatkan, salah satunya terkait pemanfaatan teknologi digital.
- Keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kualitas investasi yang menghambat ekonomi tumbuh lebih tinggi
- Stagnasi kinerja ekspor Indonesia selama 20 tahun terakhir dan rendahnya partisipasi dalam rantai nilai global
- Kompleksitas produk ekspor rendah serta daya saing ekspor masih didominasi oleh komoditas
- Peningkatan hambatan perdagangan tarif dan nontarif termasuk kebijakan *green trade* berpotensi menurunkan daya saing produk
- Belum terbangunnya ekosistem perdagangan sektor jasa
- Ketimpangan dalam aktivitas perdagangan antarwilayah
- Kerja sama bilateral, regional, dan global terkait penciptaan tata kelola maritim
- Potensi peningkatan ekspor:
 1. Produk Turunan Minyak Kelapa Sawit sebesar US\$ 12 Miliar
 2. Produk Kendaraan Bermotor sebesar US\$ 4,8 Miliar
 3. Produk Komponen Elektronik sebesar US\$ 2 Miliar
- Sumatera Selatan penghasil kopi terbesar. Ekspor kopi nasional mencapai US\$ 929 juta pada 2023
- Sulawesi Selatan penghasil rumput laut terbesar. Ekspor rumput laut nasional mencapai USD 433,71 juta pada tahun 2023
- Riau penghasil kelapa terbesar. Ekspor olahan kelapa nasional mencapai US\$ 892 juta pada 2023

Arah Kebijakan

- Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
- Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
- Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
- Optimalisasi investasi strategis negara

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan dan keseimbangan alokasi sumber daya pada setiap wilayah. Membangun dari desa dan dari bawah adalah strategi yang berorientasi pada penguatan akar perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat lokal serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif. Desa, sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahan dan ekonomi, memegang potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, negara mengakui peran penting komunitas desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial-budaya. Membangun dari desa tidak

hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan tata kelola yang menggambarkan kemandirian desa, namun juga meliputi pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah, negara berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, energi, pengasuhan, layanan sosial, perumahan dan sanitasi yang layak, serta kebutuhan individu maupun keluarga lainnya sesuai dengan hambatan yang dihadapi. Pendekatan untuk meningkatkan kemandirian penduduk miskin dan rentan dilakukan dengan mengedepankan potensi, kapabilitas, motivasi, dan akses bagi mereka untuk dapat berdaya mendapatkan ruang untuk berpartisipasi pada sektor-sektor ekonomi utama. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi pemampu lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera.

Upaya holistik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas penduduk miskin dan rentan diarahkan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan secara berkesinambungan. Kebijakan pemberantasan kemiskinan dikembangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan utama untuk memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Penduduk miskin, rentan, dan menuju kelas menengah didorong untuk menjadi aktor dan rantai pasok utama yang berperan dalam kegiatan ekonomi utama yang dapat mengeluarkan mereka dari kondisi miskin dan rentan. Penguatan dan perbaikan tata kelola program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi agenda utama untuk mendukung kebijakan ini, termasuk integrasi program lintas lembaga dan sektor, peningkatan adaptabilitas dan inklusivitas, pemanfaatan dan peningkatan akses terhadap teknologi, penggunaan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi sebagai sumber rujukan dan data tunggal

sosial dan ekonomi nasional untuk penargetan program, serta pemantauan yang intensif dan berkala dalam mengidentifikasi kebutuhan kelompok yang paling rentan dan mengakselerasi graduasi penduduk menuju sejahtera secara berkesinambungan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Untuk mengawal keberhasilan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan maka proses membangun dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat dan struktur kelembagaan tingkat terbawah yang paling dekat dengan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian layak, bukan hanya sebagai tempat tinggal melainkan juga tempat bekerja bagi beberapa segmentasi masyarakat. Maka dari itu, kebijakan kedepan dilakukan dengan memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program-program bantuan, jaminan, layanan, dan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa.

Pembangunan dari desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa-kota (rural-urban linkages). Tujuannya untuk memastikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan didukung dengan penguatan pusat aktivitas dan ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kerja, serta akses pasar inklusif.

Bersamaan dengan pembangunan di wilayah perdesaan, pembangunan kawasan perkotaan dilakukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan. Pembangunan perkotaan berkelanjutan perlu didukung dengan pendekatan kota cerdas, kelembagaan yang adaptif-dinamis serta komitmen pemerintah daerah dan regulasi yang memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pembangunan perkotaan.

Tabel III.6 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan				
1	Tingkat kemiskinan (%)	9,03	7,0–8,0	4,5–5,0
2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%) ^{a)}	1,47	0,5 –1	0
3	Proporsi penduduk kelas menengah (%)	17,13	17,50	20,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) ^{b)}	29,77 (Semester I)	32,15	43,92
5	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	9,07 (2023)	10	12
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan				
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	65,25	67,00	74,00
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan				
7	Persentase desa mandiri (%) ^{c)}	22,85	23,29	25,79
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				
8	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	56,56 (2022)	57,29	59,25
9	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) ^{b)}	44,13 (2022)	44,35	45,60

Keterangan: a) menggunakan US\$ 2,15 PPP tahun 2017; b) indikator merupakan 45 indikator RPJPN Tahun 2025–2045, namun tidak menjadi indikator pada level Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025–2029; dan c) sesuai perhitungan dan proyeksi Indeks Desa 2024.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1



Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan

Isu

- Rendahnya akurasi sasaran program perlindungan sosial dan program pemberdayaan masyarakat
- Program perlindungan sosial yang belum komprehensif dan belum menjawab sepenuhnya kebutuhan seluruh masyarakat miskin dan rentan
- Program pemberdayaan yang belum terintegrasi dan terstandar untuk peningkatan kemandirian masyarakat
- Jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh pekerja, terutama pekerja informal
- Akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan

Arah Kebijakan

- Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
- Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
- Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif

Sasaran 2



Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Isu

- Intervensi perumahan eksisting belum menjangkau seluruh segmentasi masyarakat termasuk pekerja informal, terutama dari aspek pembiayaan perumahan
- Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan MBR berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Belum optimalnya keterhunian dan pengelolaan rumah sehingga berpotensi pada menurunnya kualitas bangunan beserta lingkungan
- Belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru

Arah Kebijakan

Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman

Sasaran 3



Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Isu

- Angka kemiskinan perdesaan masih tinggi 12,22 persen (BPS, 2023)
- Pemenuhan layanan dasar desa masih bervariasi. Terdapat desa yang layanan dasar sudah terpenuhi namun masih terdapat desa yang layanan dasarnya belum baik. Secara agregat kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan perkotaan
- Aktivitas ekonomi desa dalam posisi rentan karena 96 persen ekonomi masyarakat desa didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing lemah sehingga membutuhkan penguatan dan diversifikasi
- Produktivitas dan pendapatan asli desa PADes terhadap ABPDesa masih sangat rendah (Proporsi PADes 2,1 persen dari total APBDes, 2023)
- Tata Kelola pemerintahan desa masih belum baik dan kualitas belanja desa (*quality of spending*) perlu ditingkatkan
- Belum optimalnya konsolidasi berbagai pendanaan K/L/D dalam pembangunan desa
- Desa berketahanan iklim masih rendah (33,73 persen dari 75.259 desa) sementara bencana dan dampak perubahan iklim di desa semakin sering terjadi.

Arah Kebijakan

Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan

Sasaran 4



Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Isu

- Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia hanya meningkatkan 1,4 persen PDB perkapita, **kontribusi ekonomi yang tergolong rendah** jika dibandingkan dengan Cina dan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik (Bank Dunia, 2019)
- **Pemanfaatan lahan perkotaan yang belum efisien** dan **pengendalian ruang yang kurang efektif** telah mendorong laju urbanisasi lebih tinggi di pinggiran kota yang menyebabkan permukiman tumbuh menyerak dan keluar dari kontrol
- **Ketersediaan dan akses layanan perkotaan** berupa rumah layak huni, layanan air minum, sanitasi, dan infrastruktur perkotaan **masih terbatas**, sementara pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta sarana pendidikan dan kesehatan **belum inklusif dan memadai**
- Pembangunan dan penyediaan infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata, memiliki kualitas yang terbatas, serta tidak terintegrasi secara kewilayahan.
- Rendahnya kesempatan kerja, penanganan sektor ekonomi informal yang belum optimal, serta tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kriminalitas masih menjadi **tantangan utama perkotaan pada bidang sosial-ekonomi**
- Tingkat pencemaran dan **degradasi lingkungan yang semakin tinggi** di perkotaan, ditambah dengan **rendahnya ketangguhan perkotaan** terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan hidup di perkotaan
- **Belum ada regulasi** yang mengatur perkotaan secara terpadu, kurang **dinamisnya kelembagaan**, serta **belum inovatifnya pembiayaan** pengelolaan perkotaan untuk mengatasi kompleksitas perkotaan di 2045
- **Tingginya konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa** (sebesar 56,10 persen) utamanya di **Wilayah Metropolitan Jakarta** menyebabkan **beban Jakarta dan daerah sekitarnya meningkat**, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan peningkatan dampak kerugian ekonomi.

Arah Kebijakan

- Pembangunan perkotaan berkelanjutan
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman.

Langkah-langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang kondusif bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Pemerintah berkomit menuntut memperkuat reformasi politik,

hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan Penyelundupan.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel III.7 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional				
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,73
2	Indeks Persepsi Korupsi	34 (2023)	38	43,7
3	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51	0,55
4	Indeks Integritas Nasional	70,97 (2023)	74,52	77,57
5	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00—64,99	71,00—72,99
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani				
6	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	69,98	71,38	77,26
7	Indeks Pelayanan Publik	3,78 (2023)	3,68 ^{a)}	3,80
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79 (2023)	3,00	2,00 ^{b)}
9	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93	93,5	95,5
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba				
10	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73 (2023)	1,70	1,60
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan				
11	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,14 (2023)	3,21	3,42

Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan			
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,82	12,36 13,75—18,00
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,07	10,24 11,52—15,00
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			
14	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,5±1,0 2,5±1,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Keterangan: a) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan sehingga target nasional disesuaikan, b) instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7 dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1


Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional

Isu

- Meningkatnya tren kasus korupsi yang didominasi pada sektor PBJ (kenaikan mencapai **90%** dari tahun 2022 ke tahun 2023)
- Kondisi hiper-regulasi, sepanjang tahun 2019-2023 terdapat **5.267 Peraturan Menteri** yang diterbitkan.
- Belum optimalnya proses **penanganan perkara**
- Rendahnya kepatutan hukum** masyarakat dan penyelenggara negara

- Biaya politik tinggi, pendanaan parpol** belum memadai, dan **tata kelola parpol** belum optimal
- Penyatuan **pengaturan terkait pemilu** dan pemilihan dalam satu buku yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum dalam kontestasi elektoral serta amanat MK yang final dan mengikat
- Skor **Indeks Akses terhadap Keadilan** mengalami penurunan pada tahun 2021 (53,6)

Arah Kebijakan

- Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu
- Reformasi Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum
- Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal*

Sasaran 2


Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

Isu

- Disparitas kesejahteraan ASN;**
- Keterpaduan antara layanan publik** belum optimal
- Akses pelayanan publik** belum memadai;
- Penerapan **sistem merit** belum optimal;
- Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih **terfragmentasi dan tidak efektif**
- Tata kelola pelayanan dan perlindungan WNI** di luar negeri, termasuk **PMI**, yang belum terintegrasi

- Belum optimalnya **hubungan pemerintah pusat dan daerah**
- Kesenjangan kapasitas pemerintah daerah** dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan daerah
- Tingginya ketergantungan daerah terhadap TKD** dengan rata-rata proporsi TKD terhadap total pendapatan daerah mencapai 83% (2018-2024)
- Rendahnya belanja modal pemerintah daerah**, dengan rata-rata proporsi belanja modal hanya mencapai 17,04% dari total belanja daerah (2018-2024)

Arah Kebijakan

- Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
- Pemerintah Digital
- Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
- Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia

Sasaran 3



Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

Isu

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 sebesar **1,73%** atau sekitar **3,33 juta jiwa**, angka relapse mencapai lebih dari 70%, ditambah dengan munculnya banyak NPS serta motif baru peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Arah Kebijakan

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Sasaran 4



Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan

Isu

- Rendahnya daya saing BUMN (Jumlah BUMN yang masuk peringkat dunia masih di bawah 10)
- Rasio BUMN dengan kategori sehat masih perlu ditingkatkan (rasio BUMN dengan kategori sehat 77,10% pada tahun 2023)
- Belum meratanya kemampuan BUMN dalam menghasilkan dividen
- Masih banyaknya BUMN yang merugi dalam menjalankan penugasan

Arah Kebijakan

Peningkatan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara

Sasaran 5



Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan

Isu

Kompleksnya tantangan kebijakan fiskal di Indonesia dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan

- Rendahnya pendapatan negara disebabkan masih terdapatnya kesenjangan, mencakup *administrasi gap* maupun *policy gap*
- Kualitas dan *size* belanja negara belum optimal
- Belum optimalnya dukungan pembiayaan utang dan non-utang untuk mendorong sasaran pembangunan

Arah Kebijakan

- Optimalisasi Pendapatan Negara
- Optimalisasi Belanja Negara
- Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan

Sasaran 6



Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Isu

Fluktuasi inflasi dari sisi domestik banyak dipengaruhi oleh fluktuasi komponen Inflasi Harga Bergejolak yang secara historis tercermin dari realisasi tahun 2020-2023 secara berturut-turut yaitu 3,62%, 3,20%, 5,61%, dan 6,37%. Kondisi tersebut disebabkan permasalahan struktural penyebab inflasi di Indonesia yang banyak terjadi di sisi hulu dan sifatnya multi-sektor (pasokan, teknologi manajemen pasca panen, infrastruktur perdagangan dan distribusi, serta dan kualitas data).

Arah Kebijakan

Pengendalian Inflasi

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya sebagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Toleransi antarumat beragama diwujudkan dalam tindakan nyata dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan kesejahteraan antar generasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, nilai dan warisan budaya perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan

yang harmonis dan selaras dengan lingkungan alam dan budaya, serta memperkuat toleransi antarumat beragama guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025-2029 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel III.8 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49	68,13
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39	60,70
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	78,25
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
4.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,135

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1



Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Isu

- Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama, ditunjukkan dengan potensi zakat di Indonesia yang besar (Rp327,6 Triliun, 2023), namun realisasi pengumpulan zakat masih belum optimal (Rp32,32 Triliun, 2023).
- Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang tecermin dari masih maraknya praktik korupsi [Indonesia peringkat ke-115 dari 180 negara dengan skor 34 (Indeks Persepsi Korupsi, 2023)].
- Kurangnya perhatian terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam aspek kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil [Indeks Pembangunan Masyarakat 62,85 (2021)].
- Masih kurangnya jaminan perlindungan terhadap wilayah adat dan hutan adat, ditunjukkan dengan masih terbatasnya wilayah adat yang tersertifikasi (5,99 persen dari total 7,51 juta hektare wilayah adat) dan pengakuan hutan adat [8 persen dari total 3,4 juta hektare potensi hutan adat (BRWA, 2024)].
- Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, ditandai dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba (3,3 juta jiwa, 2023), 36 persen siswa pernah mengalami perundungan (Asesmen Nasional, 2022), serta maraknya praktik judi online [terdapat 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 Triliun (PPATK, 2023)].
- Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif, tecermin dari masih adanya sikap intoleransi pada sebagian kelompok masyarakat [Indeks Kerukunan Umat Beragama 76,02 (2023)].
- Kebudayaan belum sepenuhnya dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi sosial [Indeks Pembangunan Kebudayaan 57,13 (2023)].
- Khazanah kearsipan nusantara belum optimal dikembangkan untuk memperkuat memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan [Indeks Memori Kolektif Bangsa 69,10 (2024)].

Arah Kebijakan

- Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
- Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa

Sasaran 2



Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Isu

- Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar (Indo-Australia, Pasifik, Eurasia) dan memiliki enam zona subduksi serta 13 segmen megathrust dan 295 segmen sesar aktif (Pusat Gempa Nasional, 2017)
- 53.000 desa terletak di daerah rawan bencana dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 51 juta keluarga (Katalog Desa Rawan Bencana BNPB, 2019)
- Tingginya tingkat kerentanan bencana, yang disebabkan 75 persen infrastruktur dasar berada di zona rawan bencana (BMKG, 2021)
- Terbatasnya kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana, dengan rata-rata nilai Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,46 yang tergolong dalam kategori sedang (BNPB, 2024)
- Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana akibat perubahan iklim, dengan kenaikan muka air laut 0,8-1,2 cm/tahun dan jumlah pesisir rentan sebanyak 313 kab/kota, gelombang ekstrem >1,5 m, dan perubahan curah hujan +/-2,5 mm/hari
- Aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi secara penuh dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang
- Rendahnya persentase cakupan peringatan dini bencana, sampai dengan saat ini tingkat keterpenuhan sistem peringatan dini bencana baru mencapai 6,00 persen dari total potensi masyarakat yang terpapar di kawasan berisiko bencana tinggi (BNPB, 2024)

Arah Kebijakan

- Pembangunan berketahanan iklim
- Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

Nasional Dan Provinsi pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI PD KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS

Nama PD : DINAS SOSIAL

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	APBN	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	APBN	195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja-PD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut

VISI	<i>“ Bersama Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas “</i>
MISI I	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
MISI II	Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing
MISI III	Memastikan Pemerataan Pembangunan Dari Desa Ke Kota
MISI IV	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
MISI V	Mewujudkan Lingkungan Yang Aman dan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan kelima misi tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus melaksanakan misi ke-2 yaitu **Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya**

Saing. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus juga menetapkan tujuan berdasarkan misi yang diampu yaitu **Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat.** Untuk mencapai tujuan tersebut maka Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Adalah **Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya.

Tujuan dan Sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja utama yang ditargetkan setiap tahun dari tahun 2025 hingga 2030. Terdapat dua indikator utama, yaitu Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang digunakan untuk menilai sejauh mana Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamu. Pada table di atas terlihat bahwa setiap tahunnya terdapat target peningkatan yang progresif pada kedua indikator. Hal ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam pembangunan SDM ASN, adanya tolok ukur jelas untuk evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dan lembaga terkait, dan adanya keterkaitan erat antara kualitas ASN dan efektivitas pelayanan publik.

3.3 Program Dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Sebelumnya Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Merencanakan untuk melaksanakan 7 Program dan 14 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan yang memerlukan dana sebesar Rp. 4.418.803.359,- akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terjadi pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang mengakibatkan terjadi pengurangan pagu anggaran menjadi Rp. 4.336.535.235,- atau berkurang sebesar Rp. 82.268.124,- dengan 7 Program, 14 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Anggaran Kegiatan ini semula Rp.

- 3.423.500,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 3.575.000,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 2.433.000,- pada anggaran perubahan mengalami penambahan jumlah menjadi Rp. 4.956.800,- atau bertambah sebesar Rp. 2.523.800,-.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 2.062.500,- pada anggaran perubahan mengalami penambahan jumlah menjadi Rp. 2.122.500,- atau bertambah sebesar Rp. 60.000,-.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 1.923.000,- pada anggaran perubahan mengalami penambahan jumlah menjadi Rp. 4.433.000,- atau bertambah sebesar Rp. 2.510.000,-.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 1.068.300,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 2.934.500,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 2.373.607.962,- pada anggaran perubahan mengalami penambahan jumlah menjadi Rp. 2.544.281.189,- atau bertambah sebesar Rp. 170.673.227,-.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 429.026.250,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 412.182.500,- atau berkurang sebesar Rp. 16.843.750,-.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 63.240.000,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 1.450.100,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 10.316.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 2.172.000,- atau berkurang sebesar Rp. 8.144.000,-
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 51.088.000,- pada anggaran perubahan mengalami penambahan jumlah menjadi Rp. 53.588.000,- atau bertambah sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 11.100.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 10.100.000,- atau berkurang sebesar Rp. 1.000.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 8.348.100,- pada anggaran perubahan mengalami penambahan jumlah menjadi Rp. 10.236.500,- atau bertambah sebesar Rp. 1.888.400,-.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 13.081.747,- pada anggaran perubahan mengalami penambahan jumlah menjadi Rp. 15.806.246,- atau bertambah sebesar Rp. 2.724.499,-.
- Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 71.778.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 56.281.000,- atau berkurang sebesar Rp. 15.497.000,-

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 49.290.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 44.105.000,- atau berkurang sebesar Rp. 5.185.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 31.408.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 16.408.000,- atau berkurang sebesar Rp. 15.000.000

c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 44.170.000,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 127.541.600,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 99.527.400,- atau berkurang sebesar Rp. 28.014.200,-

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 5.520.000,- pada anggaran perubahan mengalami penambahan jumlah menjadi Rp. 10.310.000,- atau bertambah sebesar Rp. 4.790.000,-.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 11.135.000,- pada anggaran perubahan mengalami penambahan jumlah menjadi Rp. 18.425.000,- atau bertambah sebesar Rp. 7.290.000,-.

2) Program Pemberdayaan Sosial dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 9.929.800,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 9.495.500,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Anggaran Kegiatan ini semula Rp.

21.273.500,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 7.123.000,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 2.770.000,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

4) Program Program Rehabilitasi Sosial dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 81.155.000,- pada anggaran

perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 45.445.000,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 63.157.200,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 12.075.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 9.075.000,- atau berkurang sebesar Rp. 3.000.000,-
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 44.535.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 0,- atau berkurang sebesar Rp. 44.535.000,-
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 37.963.400,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 30.763.400,- atau berkurang sebesar Rp. 7.200.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 9.917.500,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 6.917.500,- atau berkurang sebesar Rp. 3.000.000,-

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 42.000.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 0,- atau berkurang sebesar Rp. 42.000.000,-
- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 89.209.500,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1` Sub Kegiatan sebagai berikut

- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 103.828.000,- pada anggaran perubahan mengalami penambahan jumlah menjadi Rp. 106.228.000,- atau bertambah sebesar Rp. 2.400.000,-.

6) Program Penanganan Bencana dengan 2 Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Penyediaan Makanan, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 157.675.800,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 133.428.300,- atau berkurang sebesar Rp. 24.247.500,-
- Sub Penyediaan Sandang, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 127.465.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 110.825.000,- atau berkurang sebesar Rp. 16.640.000,-
- Sub Penyediaan Tempat Pengungsi, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 44.020.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 38.520.000,- atau berkurang sebesar Rp. 5.500.000,-
- Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 105.000.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 87.700.000,- atau berkurang sebesar Rp. 17.300.000,-
- Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial, Anggaran Sub Kegiatan ini semula Rp. 25.690.000,- pada anggaran perubahan mengalami Pengurangan jumlah menjadi Rp. 12.968.400,- atau berkurang sebesar Rp. 12.721.600,-

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 30.432.000,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kotadengan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, Anggaran Kegiatan ini semula Rp. 15.322.600,- pada anggaran perubahan tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dikarenakan dana lebih kecil dari kebutuhan misalnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan ditambah pagu anggaran maka makin bertambahnya bantuan dana kepada masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan atau disajikan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS

SUMBER DANA APBD KABUPATEN TANGGAMUS

Nama PD : Dinas Sosial

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						Sumber Dana		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan					100%	100%	3,319,520,559	3,424,796,535	113,419,976			100%	3,126,260,460		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu					100%	100%	17,419,800	22,513,600	5,093,800			100%	25,309,800		
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	10 Dokumen	10 Dokumen	3,423,500	3,423,500	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	10 Dokumen	3,423,500	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	10 Dokumen	10 Dokumen	3,575,000	3,575,000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	10 Eksemplar	4,585,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	10 Dokumen	10 Dokumen	2,433,000	4,956,800	2,523,800	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	10 Eksemplar	3,443,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	10 Dokumen	10 Dokumen	2,062,500	2,122,500	60,000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	10 Eksemplar	3,672,500	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	10 Dokumen	10 Dokumen	1,923,000	4,433,000	2,510,000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	10 Eksemplar	3,563,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	18 Dokumen	18 Dokumen	1,068,300	1,068,300	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	18 Eksemplar	2,678,300	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	20 Laporan	20 Laporan	2,934,500	2,934,500	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	20 Eksemplar	3,944,500	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu					100%	100%	2,867,324,312	3,021,153,789	153,829,477			100%	2,728,051,727		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	25 Orang	25 Orang	2,373,607,962	2,544,281,189	170,673,227	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	25 Orang	2,665,761,627	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						Sumber Dana		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	25 Dokumen	25 Dokumen	429,026,250	412,182,500	(16,843,750)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	0 Orang	0	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	12 Dokumen	12 Dokumen	63,240,000	63,240,000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	5 Orang	60,840,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	5 Laporan	5 Laporan	1,450,100	1,450,100	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	5 Buku	1,450,100	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik			-	-	100%	100%	10,316,000	2,172,000	(8,144,000)			100%	10,316,000		
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	1 Laporan	1 Laporan	10,316,000	2,172,000	(8,144,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Laporan	10,316,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana dengan baik			-	-	100%	100%	155,395,847	146,011,746	(9,384,101)			100%	114,346,933		
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	1 Paket	1 Paket	51,088,000	53,588,000	2,500,000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Paket	23,988,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	1 Paket	1 Paket	11,100,000	10,100,000	(1,000,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Paket	9,300,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	1 Paket	1 Paket	8,348,100	10,236,500	1,888,400	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Paket	8,506,400	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	1 Paket	1 Paket	13,081,747	15,806,246	2,724,499	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Paket	11,917,533	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	100 Laporan	100 Laporan	71,778,000	56,281,000	(15,497,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100 Laporan	60,635,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	100%	80,698,000	60,513,000	(20,185,000)			100%	76,978,000		
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timor	Kotaagung Timor	1 Laporan	1 Laporan	49,290,000	44,105,000	(5,185,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Laporan	45,570,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana					
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1 Laporan	1 Laporan	31,408,000	16,408,000	(15,000,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Laporan	31,408,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	100%	188,366,600	172,432,400	(15,934,200)			100%	171,258,000		
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1 Unit	1 Unit	44,170,000	44,170,000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Unit	44,170,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	6 Unit	6 Unit	127,541,600	99,527,400	(28,014,200)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	6 Unit	110,968,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	18 Unit	18 Unit	5,520,000	10,310,000	4,790,000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	18 Unit	4,910,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1 Unit	1 Unit	11,135,000	18,425,000	7,290,000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Unit	11,210,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial					100%	100%	47,821,800	47,821,800	-			100%	248,746,800		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					100%	100%	47,821,800	47,821,800	-			100%	248,746,800		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						Sumber Dana		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PSKS	PSKS	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	30 Orang	30 Orang	9,929,800	9,929,800	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	30 Orang	19,425,300	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	PSKS	PSKS	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	20 Orang	20 Orang	9,495,500	9,495,500	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	0 Orang	0	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	PSKS	PSKS	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	130 Keluarga	130 Keluarga	21,273,500	21,273,500	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	130 Orang	21,273,500	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	PSKS	PSKS	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1 Lembaga	1 Lembaga	7,123,000	7,123,000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	3 Lembaga	208,048,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani					100%	100%	2,770,000	2,770,000	-			100%	2,770,000		
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debakasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/ Kelurahan asal.	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debakasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/ Kelurahan asal.					100%	100%	2,770,000	2,770,000	-			100%	2,770,000		
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debakasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/ Kelurahan asal.	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debakasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/ Kelurahan asal.	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	10 Orang	10 Orang	2,770,000	2,770,000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	10 Orang	2,770,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana					
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Persentase PMKS yang direhabilitasi					100%	100%	439,257,600	325,722,600	(113,535,000)			100%	277,848,300		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					100%	100%	308,048,100	236,513,100	(71,535,000)			100%	189,810,800		
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	470 Orang	470 Orang	81,155,000	81,155,000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	470 Orang	59,640,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	528 Orang	528 Orang	45,445,000	45,445,000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	528 Orang	45,445,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 Orang	72 Orang	63,157,200	63,157,200	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	70 Orang	45,902,400	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Orang	7 Orang	12,075,000	9,075,000	(3,000,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	7 Orang	12,075,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	0 Orang	44,535,000	-	(44,535,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	0 Orang	0	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						Sumber Dana		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	100 Orang	100 Orang	37,963,400	30,763,400	(7,200,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100 Orang	9,963,400	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	20 Orang	0 Orang	6,900,000	-	(6,900,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	0 Orang	0	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	4 Orang	0 Orang	6,900,000	-	(6,900,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	4 Orang	6,900,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	5 Orang	5 Orang	9,917,500	6,917,500	(3,000,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	5 Orang	9,885,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					100%	100%	131,209,500	89,209,500	(42,000,000)			100%	88,037,500		
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	20 Orang	0 Orang	42,000,000	0	(42,000,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Ls	0	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	Kab. Tanggamus, Sema Kecamatan, Sema Kelurahan	25 Orang	25 Orang	89,209,500	89,209,500	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	22 Orang	88,037,500	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial					100%	100%	103,828,000	106,228,000	2,400,000			100%	194,822,000		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						Sumber Dana		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					100%	100%	103,828,000	106,228,000	2,400,000			100%	194,822,000		
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	PNS dan Non PNS	PNS dan Non PNS	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	12 Bulan	12 Bulan	103,828,000	106,228,000	2,400,000	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	12 Bulan	194,822,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani					100%	100%	490,282,800	413,873,700	(76,409,100)			100%	397,489,900		
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					100%	100%	459,850,800	383,441,700	(76,409,100)			100%	331,808,100		
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	250 Orang	157,675,800	133,428,300	(24,247,500)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	250 Orang	114,208,100	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	150 Orang	127,465,000	110,825,000	(16,640,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	150 Orang	71,890,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1 Unit	44,020,000	38,520,000	(5,500,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	1 Unit	76,000,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	100 Orang	105,000,000	87,700,000	(17,300,000)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	100 Orang	25,690,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif						Sumber Dana		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	30 Orang	25,690,000	12,968,400	(12,721,600)	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	30 Orang	44,020,000	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/ Kota	-	-			100%	100%	30,432,000	30,432,000	-			100%	65,681,800		
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	TAGANA	TAGANA	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	55 Orang	55 Orang	30,432,000	30,432,000	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	55 Orang	65,681,800	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	-	-			100%	100%	15,322,600	15,322,600	-			100%	15,290,100		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			100%	100%	15,322,600	15,322,600	-			100%	15,290,100		
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kotaagung Timur	Kotaagung Timur	1 Unit	1 Unit	15,322,600	15,322,600	-	APBD Kabupaten	APBD Kabupaten	12 Bulan	15,290,100	Sedang Berjalan	Dapat dilakukan oleh satu SKPD
JUMLAH														4,418,803,359	4,336,535,235	(82,268,124)				4,263,227,560		

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBD Provinsi Lampung disajikan dalam Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS

SUMBER DANA APBD PROVINSI LAMPUNG

Nama PD : DINAS SOSIAL

						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2025										Prakiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
									Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana						
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
JUMLAH																								

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBN disajikan dalam Tabel 6 berikut ini :

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025 Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN disajikan dalam Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS
SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI DAN APBN
Nama PD : DINAS SOSIAL

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	Keterangan		
										Hasil Program Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100%		100%		100%	3,424,796,535	3,126,260,460			
1	06	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100%		100%		100%	22,513,600	25,309,800			
1	06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	10 Dokumen	3,423,500	3,423,500	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	3,575,000	4,585,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	10 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	10 Dokumen	4,956,800	3,443,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	2,122,500	3,672,500	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen	4,433,000	3,563,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	18 Dokumen	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	18 Dokumen	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	18 Dokumen	1,068,300	2,678,300	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	20 Laporan	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj	20 Laporan	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj	20 Laporan	2,934,500	3,944,500	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%		100%		100%	3,021,153,789	2,728,051,727			
1	06	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	25 Orang	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang	2,544,281,189	2,665,761,627	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	Keterangan		
									Hasil Program Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	25 Dokumen	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	25 Dokumen	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	25 Dokumen	412,182,500	0	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	12 Dokumen	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian	12 Dokumen	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian	12 Dokumen	63,240,000	60,840,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	5 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	1,450,100	1,450,100	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100%		100%		100%	2,172,000	10,316,000			
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,172,000	10,316,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		100%		100%		100%	146,011,746	114,346,933			
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	53,588,000	23,988,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	10,100,000	9,300,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1 Paket	10,236,500	8,506,400	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	15,806,246	11,917,533	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 Laporan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Laporan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Laporan	56,281,000	60,635,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%		100%		100%	60,513,000	76,978,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	44,105,000	45,570,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	Keterangan		
									Hasil Program Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Laporan	16,408,000	31,408,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%		100%		100%	172,432,400	171,258,000			
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	44,170,000	44,170,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	6 Unit	99,527,400	110,968,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	18 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	18 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	18 Unit	10,310,000	4,910,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	1 Unit	18,425,000	11,210,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					100%		100%		100%	47,821,800	248,746,800			
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					100%	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	47,821,800	248,746,800			
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan	30 Orang	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	9,929,800	19,425,300	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan	20 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Aktif	20 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Aktif	20 Orang	9,495,500	0	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan	130 Keluarga	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Keluarga	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Keluarga	21,273,500	21,273,500	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	Keterangan		
									Hasil Program Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan	1 Lembaga	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	1 Lembaga	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	1 Lembaga	7,123,000	208,048,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					100%		100%		100%	2,770,000	2,770,000			
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					100%	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarisasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	100%	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarisasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	100%	2,770,000	2,770,000			
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	10 Orang	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarisasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	10 Orang	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarisasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	10 Orang	2,770,000	2,770,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial					100%		100%		100%	325,722,600	277,848,300			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					100%	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	236,513,100	189,810,800			
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanaan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	470 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	470 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	470 Orang	81,155,000	59,640,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	Keterangan		
									Hasil Program Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	528 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Paksaan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	528 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Paksaan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	528 Orang	45,445,000	45,445,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	72 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	63,157,200	45,902,400	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	7 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	9,075,000	12,075,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	0 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	0	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30,763,400	9,963,400	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	0	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	6,900,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	5 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	6,917,500	9,885,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	Keterangan		
									Hasil Program Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					100%		100%	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	89,209,500	88,037,500			
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saling Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	0 Orang	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	0 Orang	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	0 Orang	0	0	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saling Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	25 Orang	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	25 Orang	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	25 Orang	89,209,500	88,037,500	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					100%		100%		100%	106,228,000	194,822,000			
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					100%	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	106,228,000	194,822,000			
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saling Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	12 Bulan	Jumlah Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	106,228,000	194,822,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	06			Program Penanganan Bencana					100%		100%		100%	413,873,700	397,489,900			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					100%	Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	383,441,700	331,808,100			
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saling Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	250 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	133,428,300	114,208,100	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	Keterangan		
									Hasil Program Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	110,825,000	71,890,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	1 Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	38,520,000	76,000,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	87,700,000	25,690,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	30 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	12,968,400	44,020,000	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			-		100%	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	100%	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	100%	30,432,000	65,681,800			
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	55 Orang	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	55 Orang	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	55 Orang	30,432,000	65,681,800	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			-		100%		100%		100%	15,322,600	15,290,100			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			-		100%	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	15,322,600	15,290,100			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	Keterangan		
									Hasil Program Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Berkurangnya Angka Penduduk Miskin menjadi 9,91%	Kotaagung Timur	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 Unit	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Unit	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Unit	15,322,600	15,290,100	Dapat dilakukan oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
JUMLAH															4,336,535,235	4,263,227,560			

BAB IV



Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025, kami susun dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanggamus yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah maupun nasional.

Akhirnya semoga Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi dinas terkait, organisasi sosial masyarakat, LSM dan masyarakat luas di Kabupaten Tanggamus dalam mengacu pembangunan di semua sektor secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal, 25 Agustus 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS,**



Drs. HARDASYAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19671105 199312 1 001

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Perangkat Daerah pemangku pelayanan kepada masyarakat yang di evaluasi dan dinilai oleh Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Umbusbman dengan total Nilai Kepatuhan Tahun 2024 dengan 93,51 Zona Hijau Kualitas Tertinggi dengan rincian sebagai berikut :

DIMENSI INPUT :

Kompetensi Pelaksana

No.	Indikator	Bobot	Responden				Hasil Penilaian (%)	Keterangan
			1	2	3	4		
1	Pengetahuan tentang Komponen Standar Pelayanan	12.22	100	80	100	80	85	Untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman tentang Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan
2	Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan	8.40	100	100	100	100	95	
3	Pengetahuan tentang Lembaga Ombudsman	4.58	100	100	100	80	89	
4	pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	4.58	100	80	100	80	85	Untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman indikator tentang bentuk-bentuk maladministrasi
5	Pengetahuan tentang rekomendasi Ombusman	4.58	100	100	100	100	95	
6	Pengetahuan tentang pelayanan yang ramah kelompok marginal/rentan	3.84	80	80	100	40	69	untuk ditingkatkan lagi dalam pemahaman indikator tentang pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan
Kompetensi Pelaksana		38.20	97.99	89.19	100	82.77	87.27	

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)	Keterangan
1	Frekuensi pengawasan Internal	8.06	100	
2	Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)	8.06	80	Untuk ketersediaan jumlah petugas agar disesuaikan dengan kebutuhan di Analisis Beban Kerja (ABK)
3	Ketersediaan jaminan pelayanan	8.06	100	
4	Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.31	100	
5	Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana	5.75	80	Agar menyesuaikan untuk ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana
6	Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan	7.31	100	
7	ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan	5.85	100	
8	Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus	5.85	100	
9	Ketersediaan Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	5.55	100	
Sarana Prasarana		61.80	95.53	

No.	Indikator	Bobot	Produk		Hasil Penilaian (%)	Keterangan
			1	2		
1	Ketersediaan Persyaratan	9.00	100	100	100	
2	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	9.00	100	100	100	
3	Ketersediaan Jangka Waktu penyelesaian	10.66	100	100	100	
4	Ketersediaan Biaya/Tarif	10.66	100	100	100	
5	Ketersediaan Produk pelayanan	9.00	100	100	100	
6	Publikasi Maklumat pelayanan	3.53	100	100	100	
7	Subtansi Maklumat Pelayanan	3.53	100	100	100	
8	Pelayanan Khusus	7.96	60	60	60	
9	Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan	7.96	100	100	100	
10	Ketersediaan Moto Pelayanan	7.96	100	100	100	
11	Ketersediaan Atribut	7.96	60	60	60	Untuk dilengkapi ketersediaan atribut untuk Petugas layanan
12	Ketersediaan Pelayanan terpadu	12.78	80	80	80	Untuk Pelayanan terpadu agar ditingkatkan
Standar Pelayanan		100.00	91.08	91.08	91.08	

Produk Layanan	
1	Pelayanan Bantuan Bencana
2	Rekomendasi BPJS/KIS APBD

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)	Jumlah Responden	
1	Penundaan berlarut	1.60	100.00	1	4
2	Permintaan imbalan	18.40	100.00		
3	Penyimpangan Prosedur	18.40	100.00		
4	Tidak Kompeten	14.40	100.00		
5	Tidak Patut	12.00	100.00		
Standar Pelayanan		80.00	91.08		

MENSI OUTPUT

2. SPM/IKM

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	IKM	20.00	60
SPM/IKM		20.00	60.00

No.	Indikator	Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Penyelenggara Pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pemngelolaan pengaduan	27.34	100
	Penyelenggara Pelayanan menyediakan sarana pengaduan	13.32	100
	Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola	12.33	100
	Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan	20.34	100
	Jangka waktu penyelesaian pengaduan	11.33	100
1	Pelaksanaan penyelesaian pengaduan	15.34	100
Pengaduan		100.00	100.00

Hasil Penilaian (%)	Skala
100	5
80	4
60	3
40	2
20	1
10	0